

PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA INSTITUSI PENDIDIKAN: STUDI KASUS PADA SMP PRAWIRA MARTA KARTSURA

Sabrina Amaliawati
*Magister Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sebelas Maret Surakarta
brina271293@gmail.com*

ABSTRAK

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Penelitian ini merupakan penelitian studi literature dengan mencari referensi teori yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan mengetahui realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan di SMP Prawira Marta Kartasura dengan membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan dengan kajian teoritis dan empiris dari referensi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Prawira Marta telah melakukan pengelolaan keuangan sekolah dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan SMP Prawira Marta sudah akuntabel, efektif dan efisien serta sudah transparansi.

Kata Kunci : sekolah, pengelolaan keuangan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terusmenerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Hal ini sejalan dengan konsepsi institusi pendidikan menengah yang telah dibentuk dalam manajemen sekolah untuk berkembang berdasar konsepsi manajemen berbasis sekolah. Manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen sekolah yang baik melibatkan seluruh elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, fasilitas sekolah, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melaksanakan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengelolaan keuangan sekolah yang optimal memaksa sekolah melakukan proses manajemen keuangan sekolah dengan sebaik mungkin. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik pula. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang proses

pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Jika jumlah uang yang berlebih dapat mengurangi efisiensi dari pengelolaan keuangan sekolah, sedangkan jumlah uang yang kurang mengurangi kinerja dari sumber daya lain, seperti kinerja guru, karyawan, pemanfaatan fasilitas sekolah dan yang lainnya.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban.

Salah satu sumber pendanaan sekolah di Indonesia berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan setiap tahunnya dengan penyaluran dana dilakukan per triwulan atau per semester. Besar dana BOS yang diberikan kepada per siswa tiap tahunnya adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Jumlah dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Hal inilah yang menjadi kendala bagi sekolah-sekolah swasta dengan jumlah siswa yang sedikit jika dibandingkan dengan sekolah negeri, sehingga sekolah harus dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program kegiatan sekolah. Berdasarkan pernyataan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian di SMP Prawira Marta yang merupakan sekolah swasta untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan di sekolah tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana temuan hasil observasi di SMP Prawira Marta?
2. Bagaimanakah Pembiayaan pada SMP Prawira Marta?
3. Bagaimanakah Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan pada SMP Prawira Marta?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui temuan hasil observasi di SMP Prawira Marta.
2. Mengetahui Pembiayaan Pada SMP Pawira Marta.
3. Mengetahui Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Prawira Marta.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Pengelolaan keuangan di sekolah harus menjadi perhatian dalam pemanfaatannya secara efektif dan efisien. Sehingga, kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di sekolah harus memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan sekolah. Selain itu, kepala sekolah juga memiliki wewenang untuk mencari dan memanfaatkan sumber dana sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Leonarti, A., Suyatmini, Namiro, S. (2015: 4) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Tujuannya ialah mengoptimalkan pembiayaan pendidikan dalam rangka menghasilkan produktivitas pendidikan.

Argyropoulou, Eleftheria (2009: 114) dalam penelitiannya yang berjudul "*Financial Management in Greek State Schools*" juga menjelaskan bahwa pada siklus manajemen keuangan sekolah terdapat 4 bagian utama, yakni :

- a. Sentralisasi sumber daya (*Centralization of resource*)
- b. Alokasi sumber daya (*allocation of resource*)
- c. Implementasi sumber daya (*implementation of resource*)
- d. *Common school expenses*

Sistem pengelolaan pendidikan yang saat ini telah terdesentralisasi, memberikan kewenangan bagi kepala sekolah dalam mengelola dan mengatur kegiatan sekolah. tak

terkecuali dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemerintah melalui program BOS akan menyalurkan dana pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, peran kepala sekolah beserta staff-nya harus dapat mengelola dana pendidikan tersebut secara optimal. sehingga, pemanfaatan dana tersebut memberikan dampak pada peningkatan kualitas mutu pembelajaran. Manajemen keuangan sekolah tidak hanya berhenti pada proses pemanfaatan dana melalui penyusunan Rencana Anggaran Sekolah. Namun, kepala sekolah juga harus menyusun laporan pertanggungjawaban mengenai pemanfaatan dana keuangan sekolah kepada instansi terkait, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadi berbagai penyelewengan dan korupsi di sektor pendidikan.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

a. Transparansi

Transparansi di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

c. Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner dalam Rojay (2015) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. *Effectiveness "characterized by qualitative outcomes"*. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

d. Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Prinsip – prinsip manajemen keuangan sangat diperlukan ketika orang tua berperan penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan dana dibutuhkan Transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisiensi. Menurut Koross, et al (2009) dalam jurnal yang berjudul *Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya* :

The importance of parental contribution in the financial management of secondary schools cannot be underestimated. The centrality of parental participation in the financial management of secondary schools is anchored in the fact that transparency and accountability in financial management will be improved and this in turn will improve the effectiveness of school's resources

Yang diartikan bahwa Pentingnya kontribusi orangtua dalam pengelolaan keuangan sekolah menengah tidak dapat diremehkan. Sentralitas partisipasi orangtua dalam pengelolaan keuangan sekolah menengah berlabuh pada kenyataan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan ditingkatkan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas sumber daya sekolah.

3. Sumber – Sumber Pendapatan Sekolah

a. Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Dana ini lazim disebut dana rutin. Besarnya dana yang dialokasikan di dalam DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II dan III. Mata anggaran dan besarnya dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan Pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin (DIK) harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah sekarang juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

b. Dana dari Orang Tua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran Komite. Besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat Komite sekolah. Pada umumnya dana Komite terdiri atas :

1. Dana tetap bulan sebagai uang kontribusi yang harus dibayar oleh orang tua setiap bulan selama anaknya menjadi siswa di sekolah.
2. Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru yang biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa (pembayarannya dapat diangsur).
3. Dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya secara sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

c. Dana dari Masyarakat

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Sumbangan sukarela yang diberikan tersebut merupakan wujud dari kepeduliannya karena merasa terpanggil untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana ini ada yang diterima dari perorangan, dari suatu organisasi, dari yayasan ataupun dari badan usaha baik milik pemerintah maupun milik swasta.

d. Dana dari Alumni

Bantuan dari para Alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang (misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan belajar). Namun dana yang dihimpun oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa terpanggil untuk turut mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan demi kemajuan dan pengembangan sekolah. Dana ini ada yang diterima langsung dari alumni, tetapi ada juga yang dihimpun melalui acara reuni atau lustrum sekolah.

e. Dana dari Peserta Kegiatan

Dana ini dipungut dari siswa sendiri atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer, kursus bahasa Inggris atau keterampilan lainnya.

f. Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Ada beberapa sekolah yang mengadakan kegiatan usaha untuk mendapatkan dana. Dana ini merupakan kumpulan hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa misalnya koperasi, kantin sekolah, bazaar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dll

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan observasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Temuan Hasil Observasi di SMP Prawira Marta Kartasura

SMP Prawira Marta merupakan salah satu SMP swasta yang terletak di Jalan Kranggan, No. 01 RT. 3 RW. 3, Kranggan, Wirogunan, Kartasura, Sukoharjo.

VISI : Lebih tangguh dan religious.

MISI :

- a. Bertaqwa kepada Allah SWT.
- b. Mengoptimalkan dalam KBM.
- c. Meningkatkan pengembangan diri.
- d. Layanan bimbingan konseling.
- e. Tanggap dan cerdas dalam menerima perubahan.
- f. Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib dan kondusif untuk keefektifan kegiatan sekolah.

Visi dan misi sekolah menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga tujuan yang dituju dapat dicapai. Status kepemilikan sekolah yang merupakan yayasan pendidikan di bawah Oxford Corse Indonesia. Kepala sekolah sebagai pengelola sekolah bertanggung jawab langsung kepada pihak Yayasan mengenai pengelolaan Sekolah. Selain itu, komite sekolah juga aktif terlibat dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sekolah.

Jumlah tenaga guru dan karyawan di sekolah ini sebanyak 18. Status tenaga guru di sekolah ini terdiri dari guru tetap yayasan (GTY) dan Guru tidak tetap (GTT). Tiap guru dan karyawan telah dilakukan pembagian tugas sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pihak sekolah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga guru dan karyawan di sekolah ini. Upaya yang dilakukan diantara lain adalah keikutsertaan guru pada berbagai pelatihan peningkatan kualifikasi guru baik pada tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Selain itu, pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), PKG dan seminar. Jumlah peserta didik di SMP Prawira Marta sebanyak 70 siswa dengan 3 rombel.

Sumber pendanaan SMP Prawira Marta berasal Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan dari yayasan sebagai pemilik tunggal sekolah dan iuran bulanan dari orang tua siswa. Dana yang diterima sekolah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah. Meliputi, pembayaran gaji guru, biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana sekolah, dan pembiayaan berbagai kegiatan sekolah. Kontribusi BOS dan bantuan dari yayasan sangat penting sekali dan sangat membantu dalam pembiayaan dari kegiatan sekolah. bentuk pengawasan dan pemantauan mengenai pengalokasian dana BOS tidak dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat, Pemerintah. Sekolah hanya menyusun laporan pertanggungjawaban yang dikirim pada pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan ketua yayasan.

2. Pembiayaan Pada SMP Prawira Marta

Sistem pembiayaan pendidikan yang telah dilakukan di Indonesia sistem desentralisasi. Pemerintah melalui program BOS menyalurkan dana kepada tiap-tiap sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang dimiliki dan jenjang pendidikan tertentu. Sekolah diberikan wewenang untuk mengalokasikan dana pendidikan tersebut untuk penyelenggaraan kegiatan operasional di sekolah. selanjutnya penggunaan dana tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bentuk peranggungjawaban atas penggunaan dana keuangan sekolah.

Winkler dan Yeo dalam Korros, Ngware dan Sang (2009:65) menjelaskan bahwa *“Argue that decentralization has the potential to improve accountability, increase parental participation, strengthen the leadership role of school directors, and increase teamwork among the teaching faculty.* Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa

desentralisasi memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi orangtua, memperkuat peran kepemimpinan kepala sekolah dan meningkatkan kerjasama tim dalam mengajar.

Ikoya, Peter O. (2008: 630) menjelaskan bahwa “*decentralization is a more efficient method of managing schools’ infrastructure because it promotes accountability and reduces official corruption in schools administration*”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa desentralisasi lebih efisien dan dapat mengurangi terjadinya korupsi di sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya dari hasil observasi ditemukan bahwa sekolah hanya membuat laporan penggunaan dana BOS. Namun untuk pemeriksaan dan evaluasi dari pemerintah daerah jarang melakukan pemeriksaan langsung di SMP Prawira Marta. Apabila monitoring dan evaluasi di sekolah tidak dilakukan dengan benar, maka penerapan system desentralisasi juga dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan pendidikan yang akan berdampak pada kualitas pendidikan. Karena, dana tersebut tidak digunakan untuk upaya peningkatan kualitas sekolah.

Sumber pendanaan utama dari SMP Parawira Marta berasal dari program BOS yang disalurkan dari pemerintah pusat yaitu sebesar Rp 1.000.000,-/siswa dalam satu tahun dan iuran dari orangtua siswa sebesar Rp 17.500,-/per anak untuk uang praktek komputer serta Bapopsi (uang untuk kegiatan sekolah) sebesar Rp 2.500’-/per anak yang ditarik setiap bulan. Dana dari yayasan tidak secara rutin diberikan keapa sekolah hanya ketika dana operasional tidak mencukupi baru yayasan berperan serta dalam pendanaan. hal ini sesuai dengan hasil temuan Koross Ngware dan Sang (2009) pada Jurnal Internasional yang berjudul *Principals’ and students’ perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya* :

The importance of parental contribution in the financial management of secondary schools cannot be underestimated. The centrality of parental participation in the financial management of secondary schools is anchored in the fact that transparency and accountability in financial management will be improved and this in turn will improve the effectiveness of school’s resources.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa pentingnya kontribusi orangtua dalam pengelolaan keuangan sekolah menengah tidak dapat diremehkan. Sentralisasi partisipasi orangtua dalam pengelolaan keuangan sekolah akan bertumpu pada kenyataan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan akan ditingkatkan dan ini nanti akan meningkatkan efektivitas sumber daya sekolah.

SMP Prawira Marta ini mempunyai sistem pencatatan akuntansi yang cenderung sederhana yakni arus kas masuk dan arus kas keluar. Namun menurut kepala sekolah, pencatatan keuangan ini sudah diinformasikan kepada pemilik yayasan. Beberapa kendala dalam pencatatan akuntansi terletak pada tenaga kerja yang dimiliki SMP Prawira Marta yang tidak semua berasal dari bidang yang sesuai dengan tanggungjawab mereka sekarang dalam bekerja. Dengan demikian, menyebabkan SMP Prawira Marta mengalami hambatan dalam menginformasikan laporan keuangan.

3. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Prawira Marta Surakarta

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa masalah yang dihadapi SMP Prawira Marta. Sehingga terkesan sekolah ini tidak diminati oleh masyarakat yang dapat dilihat dari sedikitnya jumlah siswa di sekolah ini yaitu sebanyak 70 siswa. Permasalahan yang dihadapi oleh SMP Prawira Marta diantaranya permasalahan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang masih sangat minim hal ini dapat dilihat dari perpustakaan dan laboratorium yang digunakan secara bersama dengan SMA dan SMK Prawira Marta. Permasalahan selanjutnya yaitu kendala dalam pencatatan akuntansi yang terletak pada tenaga kerja yang dimiliki SMP Prawira Marta yang tidak semua berasal dari bidang yang sesuai dengan tanggungjawab mereka sekarang dalam bekerja. Menurut Fitri (2014:35):

Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang kegiatannya *mencakup* pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak terkait.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka diperlukan tenaga kerja yang benar-benar ahli dalam bidang pembukuan keuangan agar laporan keuangan yang dilaporkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemilik yayasan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan keuangan yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip manajemen keuangan sekolah seperti yang dijelsakan dalam . Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti :

1. Transparasi

Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Keterbukaan dalam manajemen keuangan pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah.

SMP Prawira Marta telah melakukan transparasi mengenai pengelolaan keuangan dengan menyelenggarakan rapat komite yang dilakukan tiap setahun sekali. Dalam rapat tersebut sekolah menyampaikan berapa jumlah dana yang masuk dan kemudian menyapaikan pengalokasian dana tersebut digunakan untuk apa serta menyapaikan rencana ke depan mengenai sekolah bagaimana. Keterlibatan orang tua siswa mendorong adanya peningkatan transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Korros, Ngware dan Sang (2009:71) "*Parents should be involved in major school projects since they mobilize school resources. In addition, parental involvement is likely to increase transparency and accountability in the management of school projects*". SMP Prawiira Marta juga melaporkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah dan pemilik yayasan sebagai bentuk transparasi.

2. Akuntability

Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berarti Sekolah membelanjakan uang secara bertanggungjawab. SMP Prawira Marta mengalokasikan Dana BOS sesuai dengan Juknis dana BOS sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada pemerintah dan orangtua siswa. Sesuia dengan yang diungkapkan oleh Lewis dalam Xaba dan Ngubane (2010:140) :

Financial accountability as a moral or legal duty, placed on an individual, group or organisation, to explain how funds, equipment or authority given by a third party has been used. In the school's case, this includes parents and the Department of Education.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa akuntabilitas keuangan merupakan kewajiban moral atau hukum yang ditempatkan pada individu, kelompok atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan atau kewenangan yang diberikan oleh pihak ketika telah digunakan. Dalam hal sekolah, termasuk orang tua dan departemen pendidikan.

3. Efektifitas

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sesui dengan pernyataan Mestry dan Ntseto (Geressu, 2014:48) "*The administration of a school's finances is an integral part of effective school administration and should be governed by clear direction*". Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa administrasi keuangan sekolah harus efektif dan harus diatur dengan arah yang jelas.

SMP Prawira Marta telah melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, hal ini diketahui dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa sejauh ini SMP Prawira Marta tidak mengalami masalah pendanaan untuk membiayaan kegiatan operasional sekolah karena mengalokasiannya telah dilakukan secara efektif sesuai tujuan.

IV. SIMPULAN

1. Simpulan

SMP Prawira Marta merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di bawah yayasan *Oxford Corse* Indonesia pemiliknya adalah Prof. Dr. Bambang Marsono, SE.MMC, Phd. Sumber pendanaan SMP Prawira Marta berasal Bantuan Operasional Sekolah (BOS), batuan dari yayasan sebagai pemilik tunggal sekolah dan iuran bulanan dari orang tua siswa. Dana yang diterima sekolah dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan operasional sekolah. Kendala yang dihadapi SMP Prawira Marta antara lain adalah masih sedikitnya jumlah siswa, sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang kegiatan pembelajaran yang masih sangat minim hal ini dapat dilihat dari perpustakaan dan laboratorium yang digunakan secara bersama dengan SMA dan SMK Prawira Marta. Pencatatan akuntansi mengenai pengelolaan keuangan cenderung sederhana yakni arus kas masuk dan arus kas keluar. Setiap akhir tahun SMP Prawira Marta melakukan rapat komite untuk menyampaikan dana yang masuk dan pengalokasiannya untuk apa saja kepada orang tua siswa, sebagai bentuk transparansi dari pihak sekolah mengenai pengelolaan keuangan.

2. Saran

Pengelolaan keuangan sekolah harus dilakukan dan diawasi dengan baik untuk menghindari penyelewengan dan korupsi dana pendidikan. Peran serta pemerintah diperlukan untuk melakukan pengawasan tersebut. Selain itu orang tua siswa juga terlibat dalam proyek-proyek sekolah utama karena mereka memobilisasi sumber daya sekolah. Selain itu, keterlibatan orang tua cenderung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek sekolah. Sesuai dengan pernyataan Korros, Ngware dan Sang (2009:71) "Parents should be involved in major school projects since they m tua siswa juga dibutuhkan obilize school resources. *In addition, parental involvement is likely to increase transparency and accountability in the management of school projects*".

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Prawira Marta Kartasura yang telah memberikan ijin untuk melakukan survey; juga terima kasih kepada prodi magister pendidikan ekonomi FKIP UNS yang telah memfasilitasi adanya kegiatan ini.

REFERENSI

- Argyropoulou, Eleftheria. (2009). Financial Management in Greek State Schools. *ISEA*, 37 (2). 111-124.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*. Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Depdiknas.
- Fitri, Afrilliana. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandingin Koto Selayan Kota Bukit tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. Volume 2 Nomor 1, Halaman 33 - 831.
- Geressu. (2014). Management of Finance with Reference to Selected Secondary School of Oromia Region, Ethiopia. *Pratibimba - Volume : 14, Issue :1*.
- Ikoya, Peter O. (2008). Centralization and Decentralization of Schools' Physical Facilities Management in Nigeria. *Journal of Educational Administration*, 46 (5). 630-649.
- Leonarti, A., Suyatmini, & Namiro, S. (2015). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen. Naskah Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peter Kiplangat Koross, Moses Waithanji Ngware, Anthony Kiplangat Sang. 2009. Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya. *Quality Assurance in Education*. Vol. 17 Iss 1 pp. 61 – 78
- Rojay. (2015). Makalah Manajemen Keuangan .(online). <http://mooza-alkaz.blogspot.co.id/2013/01/makalah-manajemen-keuangan-pendidikan.html>. di akses Tanggal 12 Desember 2016 Jam 12.21 WIB
- Xaba dan Ngubane. (2010). Financial accountability at schools: challenges and implications *Journal of Education*. No.5

